



# Model Komunikasi Advokasi Pemecahan Korupsi di Indonesia

Ira Febriyanti<sup>1</sup>, Nurul Arumawati<sup>2</sup>, Amanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Malang, Indonesia

E-mail: [irafebriyanti46@gmail.com](mailto:irafebriyanti46@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-01  <b>Keywords:</b> <i>Advocacy;</i> <i>Corruption Resolution;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Public Awareness;</i> <i>Law Enforcement;</i> <i>Private Sector.</i>	This study explores the challenges and strategies in advocating for the resolution of corruption in Indonesia, focusing on three main aspects: public awareness, law enforcement, and private sector involvement. Employing a qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews and document analysis to understand existing perceptions and practices. Findings reveal that low public awareness of the impacts of corruption, compromised independence of law enforcement agencies, and inconsistent implementation of corporate governance are major hurdles. A holistic approach involving active collaboration among the government, civil society, and private sector is essential to achieve significant changes in combating corruption and fostering better governance.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Advokasi;</i> <i>Pemecahan Korupsi;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Kesadaran Publik;</i> <i>Penegakan Hukum;</i> <i>Sektor Swasta.</i>	Studi ini mengeksplorasi tantangan dan strategi dalam advokasi pemecahan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek utama: kesadaran publik, penegakan hukum, dan keterlibatan sektor swasta. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk memahami persepsi dan praktik yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran publik yang rendah terhadap dampak korupsi, rendahnya independensi lembaga penegak hukum, dan implementasi tata kelola perusahaan yang kurang konsisten menjadi hambatan utama. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang lebih baik.

## I. PENDAHULUAN

Model komunikasi advokasi dalam pemecahan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan mendalam, seiring dengan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta. Korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan ekonomi negara, menghambat pembangunan, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Menurut para ahli, seperti yang diutarakan pada tahun 2020 oleh Transparency International Indonesia, pendekatan yang efektif dalam mengatasi korupsi melalui model komunikasi advokasi memerlukan kombinasi strategi yang holistik. Strategi ini mencakup pendidikan publik tentang pentingnya tata kelola yang baik, pengawasan masyarakat yang aktif terhadap pengelolaan keuangan publik, serta penguatan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi.

Model komunikasi advokasi juga perlu mengintegrasikan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi publik dan menguatkan kontrol sosial.

Pada tahun 2023, sebuah studi oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengekspos tindakan korupsi secara lebih cepat dan efektif. Di samping itu, partisipasi aktif dari sektor swasta dalam advokasi anti-korupsi juga dianggap penting. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, mempromosikan praktik bisnis yang etis, serta mengurangi risiko korupsi dalam berbagai transaksi bisnis.

Secara keseluruhan, pendekatan yang inklusif dan terintegrasi dalam model komunikasi advokasi untuk pemecahan korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga penegakan hukum yang kuat, kebijakan yang jelas, serta komitmen politik yang kokoh untuk mencapai perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

## II. METODE PENELITIAN

Salah satu metode kualitatif yang cocok untuk memahami dan menggali isu-isu kompleks terkait advokasi pemecahan korupsi di Indonesia adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam memungkinkan para peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan kunci, seperti aktivis anti-korupsi, pejabat pemerintah, dan pemimpin masyarakat, untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi mereka terhadap tantangan dan solusi dalam mengatasi korupsi. Dalam konteks ini, peneliti dapat merancang pertanyaan yang terstruktur untuk memperoleh informasi tentang pengalaman konkret mereka dalam berpartisipasi dalam advokasi anti-korupsi, hambatan-hambatan yang mereka hadapi, serta pandangan mereka terhadap efektivitas strategi yang ada. Wawancara mendalam juga memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa dan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi upaya anti-korupsi di Indonesia secara lebih detail.

Selain itu, teknik analisis isi juga dapat digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen seperti laporan publik, media massa, dan kebijakan pemerintah terkait anti-korupsi. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan pola dalam narasi publik tentang korupsi, serta untuk mengevaluasi sejauh mana isu-isu ini diberitakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Kombinasi metode kualitatif ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika advokasi anti-korupsi di Indonesia, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di negara ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konteks advokasi pemecahan korupsi di Indonesia adalah keterbatasan kesadaran publik akan dampak negatif korupsi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional.

Menurut teori Komunikasi Pembangunan, Everett M. Rogers (1983) mengemukakan bahwa kesadaran publik merupakan langkah awal dalam proses perubahan sosial. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang korupsi, mereka cenderung kurang peduli atau kurang aktif dalam meminta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga publik. Penelitian oleh Transparency International pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun terdapat

upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan transparansi dan memerangi korupsi, kesadaran masyarakat Indonesia tentang dampak negatif korupsi masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya literasi politik dan informasi yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Rogers, perubahan perilaku masyarakat terkait kesadaran ini memerlukan pendidikan yang terus menerus dan kampanye informasi yang efektif, yang dapat mengubah sikap dan perilaku individu terhadap praktik korupsi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan media massa, media sosial, dan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi secara konkret, seperti menurunnya kualitas layanan publik, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesadaran publik dapat menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah dalam memerangi korupsi secara efektif di Indonesia.

### 2. Konteks advokasi pemecahan korupsi di Indonesia adalah keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

Teori yang relevan untuk mendiskusikan masalah ini adalah teori mengenai kekuasaan dan keadilan dalam konteks hukum, seperti yang dikembangkan oleh Max Weber. Menurut Max Weber (1864-1920), hukum tidak hanya sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk menjaga kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia, terdapat tantangan besar dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum dari tekanan politik dan ekonomi yang kuat. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang seringkali tidak dihukum secara tegas atau mendapatkan hukuman yang ringan.

Studi terbaru oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam mekanisme hukum dan penegakan hukum anti-korupsi, masih ada kekhawatiran yang besar tentang kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bertindak secara

independen dan efektif. Faktor seperti intervensi politik, birokrasi yang lamban, dan korupsi internal di dalam sistem peradilan seringkali menghambat proses penegakan hukum yang adil dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang mendalam dalam sistem peradilan dan penguatan independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Pendekatan yang melibatkan pemberantasan korupsi internal di dalam sistem peradilan, peningkatan kapasitas investigatif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik dapat menjadi langkah-langkah yang penting. Selain itu, dukungan yang kuat dari masyarakat sipil dan pemantauan internasional juga dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan tekanan politik terhadap reformasi hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak hanya memerlukan reformasi kelembagaan yang dalam, tetapi juga membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk menjaga independensi dan integritas sistem peradilan sebagai prasyarat utama dalam memerangi korupsi secara efektif.

### **3. Konteks advokasi pemecahan korupsi di Indonesia adalah keterlibatan sektor swasta dalam praktik tata kelola yang baik dan pengurangan risiko korupsi dalam transaksi bisnis.**

Teori yang relevan untuk membahas masalah ini adalah teori tata kelola perusahaan (corporate governance), yang menyoroti pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik dan etis. Menurut teori tata kelola perusahaan, seperti yang dikembangkan oleh Monks dan Minow (2011), tata kelola perusahaan yang baik mencakup praktik-praktik yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Di Indonesia, sektor swasta memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, namun tantangannya adalah rendahnya kesadaran dan implementasi praktik tata kelola yang baik di kalangan perusahaan. Studi terbaru juga oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di sektor swasta, masih

banyak perusahaan yang belum menerapkan praktik-praktik ini secara konsisten. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan internal yang kuat, kurangnya kesadaran akan risiko korupsi, serta tekanan untuk mencapai target bisnis yang tinggi sering kali menyebabkan penurunan integritas dan meningkatkan risiko korupsi dalam operasional perusahaan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Penguatan regulasi dan insentif bagi perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik, seperti pengembangan kode etik, pelaporan keuangan transparan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi, dapat menjadi langkah-langkah kunci. Selain itu, pembentukan kemitraan antara perusahaan dengan lembaga pemantau anti-korupsi juga dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan juga akuntabilitas di dalam sektor swasta.

Dengan demikian, upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam advokasi pemecahan korupsi di Indonesia tidak hanya membutuhkan kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah, tetapi juga peran aktif dari pemangku kepentingan lainnya untuk membangun lingkungan bisnis yang lebih integritas dan bertanggung jawab. Hanya dengan kolaborasi yang kokoh antara sektor publik dan swasta, perubahan yang signifikan dalam memerangi korupsi dapat dicapai dan dipertahankan secara berkelanjutan.

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Secara keseluruhan, upaya advokasi dalam pemecahan korupsi di Indonesia menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi, memperkuat penegakan hukum terhadap kasus korupsi di tingkat elit politik dan birokrasi, serta menggalang keterlibatan aktif sektor swasta dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi ekonomi dan sosial korupsi merupakan langkah awal yang vital untuk mendukung upaya pemerintah. Sementara itu, reformasi dalam sistem peradilan diperlukan untuk menjamin independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi tanpa intervensi politik yang merugikan. Di sisi lain, sektor swasta perlu lebih berperan aktif dalam

menerapkan praktik tata kelola yang baik, seperti transparansi dalam laporan keuangan dan peningkatan integritas bisnis. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi, memastikan keadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

#### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Model Komunikasi Advokasi Pemecahan Korupsi di Indonesia

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Statistik Korupsi dan Tata Kelola

Rogers, EM (1983). Difusi Inovasi (Edisi ke-3rd). Kebebasan media.

Transparansi Internasional Indonesia. (2020). Indeks Persepsi Korupsi: Laporan Negara Indonesia. Diakses dari: <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

Biksu, RAG, & Minow, N. (2011). Tata Kelola Perusahaan (Edisi ke-5). John Wiley & Putra.

Pengawasan Korupsi Indonesia (ICW). (2023). Laporan Keadaan Korupsi di Indonesia. Diakses dari: <https://www.indonesiancorruptionwatch.org/>

PricewaterhouseCoopers (PwC). (2022). Laporan Tata Kelola Perusahaan Global. Diakses dari: <https://www.pwc.com/>